



# **WALIKOTA BIMA**

**PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**TAHUN 2024**





WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 254);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Layan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.



### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.077.181.509.176,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp101.235.701.579,00 (seratus satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.557.655.102,00 (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.236.514.567,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.656.772.700,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.784.759.210,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
  - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp774.440.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).



- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.200.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).
- (7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.003.685.435,00 (lima belas milyar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.177.934.667,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.873.394.750,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.282.305.399,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.954.209.168,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



## Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk Lain; dan
  - f. Pendapatan denda pajak daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.793.626.128,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.365.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.385.268.082,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp975.945.807.597,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp934.528.069.250,00 (sembilan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.417.738.347,00 (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

## Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. insentif fiskal;
  - b. dana bagi hasil (DBH);
  - c. dana alokasi umum (DAU); dan



- d. dana alokasi khusus (DAK)
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.477.005.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.027.324.250,00 (seratus tujuh milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp506.287.944.000,00 (lima ratus enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp313.735.796.000,00 (tiga ratus tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan bagi hasil.

#### Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.130.244.381.866,00 (satu triliun seratus tiga puluh milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp818.414.092.367,00 (delapan ratus delapan belas milyar empat ratus empat belas juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp526.669.458.971,00 (lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.283.872.071,00 (dua ratus enam puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).



- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.326.061.325,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.134.700.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp366.357.878.232,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.218.331.692,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.121.617.786,00 (sebelas milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp587.849.985,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.857.781.276,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOSP; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD;



- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.343.169.536,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.593.469.001,00 (seratus satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.687.466.950,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.556.487.397,00 (empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.986.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.616.307.800,00 (dua puluh satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.500.556.387,00 (enam belas milyar lima ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.618.533.325,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.767.560.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.055.448.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.884.520.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).



#### Pasal 18

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.816.200.000,00 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp309.830.289.499,00 (tiga ratus sembilan milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.579.245.169,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.466.945,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp191.851.033.877,00 (seratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.344.123.408,00 (tujuh puluh lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.420.100,00 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu seratus rupiah).

#### Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri dari atas belanja modal tanah.

## Pasal 21

- (1) Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga
  - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
  - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
  - f. belanja modal alat laboratorium
  - g. belanja modal komputer
  - h. belanja modal alat peraga;
  - i. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.864.108.060,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus delapan ribu enam puluh rupiah)
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.310.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.731.192.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp227.180.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 22.521.373.410,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.849.840.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.844.592.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (9) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.202.100,00 (empat puluh delapan juta dua ratus dua ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.361.669.375,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

## Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri dari:



- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.481.093.604,00 (seratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah).
  - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp919.940.273,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga).

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.949.361.173,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.099.762.235,00 (dua puluh delapan milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.295.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta).

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.820.100,00 (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri dari atas belanja tidak terduga.

## Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp53.062.872.690,00 (lima puluh tiga milyar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp53.062.872.690,00 (lima puluh tiga milyar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

## Pasal 28

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas penyertaan modal daerah.

## Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp53.062.872.690,00 (lima puluh tiga milyar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp53.062.872.690,00 (lima puluh tiga milyar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

## Pasal 30

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;



4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

#### Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR 915





**PERATURAN KEPALA DAERAH  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**LAMPIRAN I**

**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG  
DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN  
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN  
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 40 Tahun 2024  
Tanggal : 31 Desember 2024

KOTA BIMA  
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.235.701.579,00
4.1.01	Pajak Daerah	42.557.655.102,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	774.440.250,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	71.440.250,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	71.440.250,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	103.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	103.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	54.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	54.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	54.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	74.200.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	74.200.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	74.200.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	266.380.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	266.380.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	21.800.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	21.800.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	211.820.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	211.820.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.100.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.100.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.100.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15.003.685.435,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.502.610.435,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.800.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	702.610.435,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	11.100.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.100.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.167.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.107.000.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	60.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	180.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	180.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	54.075.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.050.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	35.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	15.025.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.177.934.667,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	10.177.934.667,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	10.177.934.667,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.873.394.750,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	5.873.394.750,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	5.873.394.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	37.236.514.567,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	31.282.305.399,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.123.155.399,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	14.223.230.899,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.391.924.500,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	508.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	456.350.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	443.750.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	12.600.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.002.800.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	895.300.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	107.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.954.209.168,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	132.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	132.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.516.242.168,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.516.242.168,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	337.212.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	337.212.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	10.500.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	10.500.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	384.800.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	384.800.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	260.295.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	260.295.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.313.160.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.313.160.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.656.772.700,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.656.772.700,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.656.772.700,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.656.772.700,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.784.759.210,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.793.626.128,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	768.706.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	673.790.000,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	94.916.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.007.800.128,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00
4.1.04.01.03.0054	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	992.800.128,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	17.120.000,00
4.1.04.01.05.0071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	17.120.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	600.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.385.268.082,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.385.268.082,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.385.268.082,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.000.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.000.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	500.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	500.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	975.945.807.597,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	934.528.069.250,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.477.005.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.477.005.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.477.005.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	107.027.324.250,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	38.771.037.500,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	6.435.207.750,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	8.269.208.250,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	24.066.621.500,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	68.256.286.750,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	12.108.750,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	68.212.399.250,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	19.571.500,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	12.207.250,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	506.287.944.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	433.728.061.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	433.728.061.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	72.559.883.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.200.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	16.192.269.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	25.262.120.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	19.188.725.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.716.769.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	313.735.796.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	208.928.868.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.849.840.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00
4.2.01.09.01.0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	36.366.777.000,00
4.2.01.09.01.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	344.540.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	170.367.711.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	104.806.928.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.136.650.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	739.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	58.878.426.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	841.500.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.369.250.000,00
4.2.01.09.02.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	599.897.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.214.283.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.197.982.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.742.072.000,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	3.988.510.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	458.668.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.417.738.347,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.417.738.347,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.417.738.347,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	886.326.134,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	679.660.988,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.292.927.546,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	53.586.294,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.505.237.385,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.077.181.509.176,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	818.414.092.367,00
5.1.01	Belanja Pegawai	526.669.458.971,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	366.357.878.232,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	274.520.213.704,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	194.952.780.504,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	79.567.433.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.216.612.364,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.338.535.052,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.878.077.312,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.967.780.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.967.780.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.676.063.672,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.263.253.672,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.412.810.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.621.803.025,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.202.510.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.419.293.025,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.448.656.980,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.472.848.260,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.975.808.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	754.246.942,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	749.645.164,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.601.778,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.215.073,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.541.827,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.673.246,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.612.928.254,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.002.746.970,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.610.181.284,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	633.844.614,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	442.876.076,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	190.968.538,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.901.513.604,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.328.632.818,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	572.880.786,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	139.218.331.692,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	35.931.673.520,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	32.342.738.131,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.588.935.389,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	18.018.868.064,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	15.004.748.020,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	3.014.120.044,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	168.910.703,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	168.910.703,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	23.836.681.299,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	21.444.057.546,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.392.623.753,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.262.198.106,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	337.500.000,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	112.500.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	15.466.040,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	16.462.486,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	840.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.000.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	145.308.692,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	112.000.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	388.865.821,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	31.362.000,00
5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.040.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	152.677.600,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	749.600,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.168.400,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.878.426.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	841.500.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	188.331.467,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.121.617.786,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.067.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.067.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.832,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.832,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.687.950.696,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	154.560.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.528.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.132.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.132.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	246.676.500,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	246.676.500,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	587.849.985,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.762.130,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.762.130,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.594.020,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.594.020,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.352,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.352,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.637,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.637,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.885.200,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.885.200,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	14.102.912,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	14.102.912,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	423.088,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	423.088,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	230.510.772,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.744.403,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	540.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	53.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	121.426.369,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	155.427.590,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	14.297.750,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.436.380,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.213.100,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.010.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.972.840,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	19.500.900,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.778.870,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	187.400,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	7.806.600,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	836.250,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.887.500,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8.857.781.276,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	8.857.781.276,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	8.857.781.276,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.283.872.071,00
5.1.02.01	Belanja Barang	68.343.169.536,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.343.169.536,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.170.763.876,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	146.749.300,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.540.060.150,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.240.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	278.476.200,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.633.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	624.955.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	264.465.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	8.151.250,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.815.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.920.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.149.436.560,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.518.962.560,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.977.634.447,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	743.435.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	25.031.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	61.384.700,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	708.463.495,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.431.798.900,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	122.657.100,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	64.650.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	657.296.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	818.015.036,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.889.606.297,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.024.490.520,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.021.194.880,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.800.000.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	24.771.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.774.036.440,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.301.659.650,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.099.941.175,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	252.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.462.905.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	81.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	104.800.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	282.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	382.470.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	90.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	5.200.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	278.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	32.500.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	28.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	101.593.469.001,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79.005.309.605,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.188.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.243.450.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	192.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	623.700.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	71.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	648.730.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	110.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	647.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.801.760.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.177.257.733,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	254.780.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	84.045.360,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	492.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	378.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.580.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.100.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	127.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.234.463.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	165.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.855.330.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	491.590.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.898.300.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	136.700.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	62.400.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	530.200.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	16.100.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	225.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	438.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	110.331.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.225.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	21.196.250,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.322.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.487.857.720,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.694.640.542,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	103.100.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.815.993.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	255.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.818.670.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	510.940.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.036.239.232,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.878.460.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.098.384.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	282.475.536,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	353.118.696,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	423.801.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.600.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	3.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.054.615.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	12.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	127.368.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	40.800.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4.150.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	19.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.500.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	17.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.801.797.000,00
5.1.02.02.04.0364	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	21.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	855.210.800,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	183.500.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	32.800.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	634.910.800,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	52.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	52.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.843.400.000,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	35.700.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	259.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	67.600.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	766.700.000,00
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	26.400.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	95.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	328.400.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	5.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	600.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	129.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	80.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	373.886.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	239.900.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	20.500.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	13.486.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	35.270.400,00
5.1.02.02.10.0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	35.270.400,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.967.146.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.088.417.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	778.729.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	366.791.964,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	112.500.000,00
5.1.02.02.13.0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	37.500.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.842.164,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	756.000,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.038.800,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.500.000,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	146.655.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.687.466.950,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.455.187.550,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	166.739.300,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	120.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.861.875,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.249.480.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	880.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	559.170.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	14.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.765.850.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	366.861.875,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	70.550.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	265.534.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	359.900.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	19.400.000,00
5.1.02.03.02.0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	321.200.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	142.140.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.052.279.400,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.685.379.400,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	30.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	136.900.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.000.000,00
5.1.02.03.04.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	180.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.556.487.397,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.456.487.397,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.953.682.397,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.253.135.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.953.770.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	295.900.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	100.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.986.415.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.478.515.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.353.515.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	125.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	507.900.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	315.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	192.900.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21.616.307.800,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	20.108.090.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	20.024.260.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	83.830.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.363.653.900,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.331.483.900,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	32.170.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	144.563.900,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	144.563.900,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.500.556.387,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.500.556.387,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.500.556.387,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.326.061.325,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.618.533.325,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	995.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	995.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.108.533.325,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.108.533.325,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.515.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.515.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.767.560.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.704.880.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.704.880.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.062.680.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.062.680.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.055.448.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.055.448.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.055.448.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.884.520.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.276.090.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.276.090.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	1.608.430.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	1.608.430.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.134.700.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	118.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	118.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	118.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.816.200.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.816.200.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.816.200.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	309.830.289.499,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.579.245.169,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.579.245.169,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.979.245.169,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	5.979.245.169,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	600.000.000,00
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.466.945,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.864.108.060,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.864.108.060,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	4.834.108.060,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	30.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	552.310.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	552.310.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	328.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	224.310.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.731.192.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	445.572.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	445.572.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	728.620.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	152.070.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	148.900.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	411.430.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	16.220.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	557.000.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	165.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	206.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	34.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	151.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	227.180.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	202.180.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	111.000.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	91.180.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	25.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	25.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.521.373.410,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	22.521.373.410,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	22.521.373.410,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.849.840.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.849.840.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.849.840.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.844.592.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.729.990.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.680.990.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	49.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	114.602.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	92.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.602.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	48.202.100,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.156.100,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.156.100,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	44.046.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	44.046.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.361.669.375,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.361.669.375,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.361.669.375,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.851.033.877,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	190.481.093.604,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.481.093.604,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	176.555.967.828,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	210.965.300,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	10.996.000.476,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.718.160.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	450.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	450.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	450.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	919.940.273,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	919.940.273,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	919.940.273,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.344.123.408,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	44.949.361.173,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	44.949.361.173,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	36.521.855.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	5.545.772.598,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	2.881.733.575,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	28.099.762.235,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.240.000.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.240.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	13.938.771.270,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	13.938.771.270,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	12.920.990.965,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	12.861.150.865,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	59.840.100,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.295.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.195.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.195.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	100.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.420.100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.600.000,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	3.600.000,00
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Musik Lainnya	3.600.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	51.820.100,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	3.900.000,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	3.900.000,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	47.920.100,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	47.920.100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.130.244.381.866,00
	Total Surplus/(Defisit)	-53.062.872.690,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.062.872.690,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.062.872.690,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	53.052.872.690,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	53.052.872.690,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	15.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	18.132.076.573,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	19.920.796.117,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	10.000.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	53.062.872.690,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Bima, 31 Desember 2024  
Pi. Walikota  
  
MUHKTAR  
